

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata dewasa kini mengalami pertumbuhan luar biasa dan diversifikasi selama beberapa dekade terakhir serta telah menjadi salah satu pemicu pertumbuhan sektor ekonomi tercepat di dunia (UNWTO, 2013). Jumlah kunjungan wisatawan internasional terus meningkat dan diperkirakan dalam periode 2010 hingga 2030 akan bergerak tumbuh sebesar 3,3 persen (UNWTO, 2013). Bahkan menurut *World Travel and Tourism Council* (WTTC, 2018), pariwisata sebagai salah satu sektor yang berpengaruh pada ekonomi dunia, kegiatan perjalanan dan berwisata dapat memberikan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan ekspor dan memberikankemakmuran serta kesejahteraan di seluruh dunia. Pariwisata saat ini memberikan 10,4% dari GDP (*Gross Domestic Product*) global dan membuka 313 juta lapanganpekerjaan atau setidaknya 9,9% dari total pekerjaan yang tersedia pada tahun 2017.(WTTC, 2018). Hal ini memberikan dampak dimana industri pariwisata semakin memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia, karena manfaatnya yang dapatmenyediakan lebih banyak peluang kerja di segmen pasar yang inovatif (White, 2002).

Menurut Gubernur Bank Indonesia yakni Perry Warjiyo (2019), Indonesia memiliki 10 penyumbang devisa terbesar, dan industri pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah industri CPO. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa pariwisata telah menyumbang devisa Negara sebesar 17 miliar US dollar atau setara dengan Rp246 triliun

(<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190319084140-17-6146/bi-pariwisata-bisa-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua>) di akses 14 Februari 2020. Sumber daya pariwisata di Indonesia yang sangat berlimpah dengan bentang alam (*Natural Resources*) dan kebudayaan beragam (*Cultural Resources*) menjadikan daya tarik yang menarik bagi wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Dengan potensi pariwisata yang tersedia dirasa dapat berdampak baik bagi pendapatan ekonomi masyarakat dan para pelaku bisnis dalam bidang pariwisata. Sejalan dengan PP Nomor 50 Tahun 2011 yang memuat visi dalam pembangunan kepariwisataan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata berkelas internasional, berdaya saing, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indonesia memiliki 34 provinsi yang terdiri dari berbagai macam pulau dan hamper di setiap daerah mempunyai potensi pariwisata yang memiliki keunikan tersendiri, Provinsi Jawa Barat yang diketahui sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menurut (PP No. 50 Tahun 2011) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan Pantai Pangandaran menjadi salah satu destinasi unggulannya. Berkaca pada potensi pariwisata yang baik serta menawarkan berbagai daya tarik khususnya wisata alam yang menarik untuk dikunjungi serta dapat mengundang wisatawan nusantara maupun mancanegara. Strategisnya lokasi Pantai Pangandaran serta didukung dengan bentang alam dan kebudayaan yang sangat berpotensi untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan agar memberi dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Wisata Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa keunikan objek daya tarik wisata yang sangat lengkap seperti wisata alam, bahari, kebudayaan, sejarah serta kuliner. Hingga saat ini Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa objek wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara seperti: Pantai Pangandaran, Pantai Batu Karas, Pantai Karapyak, Pantai Batu Hiu , Pantai Keusik Luhur, Pantai Karang Tirta, Pantai Madasari, Pantai Karang Nini, Green Canyon (Cukang Taneuh), Curug Bojong, Santirah River Tubing, Curug Citumang, Curug Jojogan, Desa Wisata Selasari, Cagar Alam Pananjung, Saung Muara, Goa Sumur mudal serta Air Terjun (BAPPEDA Jawa Barat 2016).

Berikut pemaparan data jumlah kunjungan wisatawan ke beberapa obyek daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 4 tahun.

**TABEL 1**  
**JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN**  
**KABUPATEN PANGANDARAN 2016-2019**

No	Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan				Rata rata pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	
1	Pantai Pangandaran	1.402.960	2.061.547	2.789.905	2.665.211	10 %
2	Batu Hiu	89.349	156.102	218.076	180.504	8,5%
3	Batu Karas	298.242	455.552	595.245	520.924	5,4%
4	Green Canyon	154.548	155.182	165.896	139.630	2%
5	Karapyak	48.945	126.176	276.582	269.004	31%
	Jumlah	1.994.044	2.954.559	4.045.704	3.775.273	8,4%
	Total PAD	5.732.038.150	14.598.742.005	19.813.647.250	18.472.858.000	33%

Sumber : Data olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran 2020.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rata rata jumlah kunjungan wisatawan ke objek daya tarik wisata unggulan Kab. Pangandaran terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan wisatawan 8,4 % dan 33% untuk rata-rata

peningkatan pendapatan asli daerah sejak tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa pariwisata di Kabupaten Pangandaran memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi wisatawan yang akan berkunjung serta dipercaya dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat lokal karena PAD dari sektor pariwisata yang mumpuni. Potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran dirasa dapat terus berkembang terutama bagi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dikarenakan keindahan alam Kabupaten Pangandaran yang menjanjikan.

Namun sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh perkembangan sektor pariwisata di Indonesia khususnya Kabupaten Pangandaran, terdapat faktor eksternal yang perlu perhatian khusus ketika melakukan pengembangan yaitu faktor bencana alam yang dapat menimpa setiap Negara secara mendadak, sehingga masyarakat dan wisatawan di kawasan objek wisata tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan langkah antisipasi terhadap bencana.

Kawasan Asia-Pasifik terletak di dalam *ring of fire*, kawasan pantai menyajikan banyak hal menarik namun rentan terhadap bahaya alam termasuk tsunami, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan angin kencang (Terry & Goff, 2012). Indonesia secara geografis terletak di *Ring of Fire* dan memiliki rute panjang 1200 km dari Sabang sampai Papua yang merupakan batas dari tiga lempeng utama dunia yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan Eurasia serta merupakan lempeng alam yang sangat besar. Selain itu, Indonesia terletak di tiga pegunungan di dunia: Alpine Sunda, Circum Pacific dan Circum Australia. Lebih dari 500 gunung berapi yang 128 di antaranya memiliki status aktif serta menjadi negara kepulauan terbesar dikarenakan 2/3 luas Indonesia merupakan

lautan, memiliki kurang lebih 5 ribu sungai besar dan kecil yang 30% diantaranya melintasi wilayah padat penduduk. Hadi Purnomo & Ronny Sugiantoro (2009) menyampaikan bahwa 87% Indonesia adalah wilayah yang rawan akan bencana alam, dengan 383 Kabupaten atau Kotamadya merupakan daerah yang sangat berpotensi mengalami bencana alam dari total 440 Kabupaten atau Kotamadya di Indonesia.

Berikut disajikan data bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun berdasarkan sumber Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) :

**TABEL 2**  
**DATA BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2010-2019**

Jenis bencana	Jumlah	Korban (jiwa)			Rumah (unit)	Kerusakan fasilitas umum(unit)
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi		
<b>Banjir</b>	6.932	1.984	37.537	13.368.635	3.477.768	3.296.590
<b>Tanah Longsor</b>	4.688	1.789	1.474	230.907	33.872	471
<b>Gelombang Pasang</b>	196	64	32	144.690	37.947	34.566
<b>Puting Beliung</b>	6.003	310	1.890	158.763	194.177	1.336
<b>Kekeringan</b>	786	2	0	11.812.506	0	0
<b>Kebakaran Hutan dan Lahan</b>	949	35	374	442.647	128	2
<b>Gempa Bumi</b>	175	758	7.103	689.776	305.040	5.260
<b>Tsunami</b>	9	968	14.566	56.552	3.512	21
<b>Gempa Bumi dan Tsunami</b>	2	3.475	4.438	221.450	68.451	614
<b>Letusan Gunung Api</b>	110	432	2.291	978.520	20.771	679
<b>JUMLAH</b>	<b>19.850</b>	<b>9.817</b>	<b>69.705</b>	<b>28.104.446</b>	<b>4.141.666</b>	<b>3.339.539</b>

Sumber : BNPB 2021

Dalam kurun waktu 10 tahun tercatat sekitar 19.850 kasus terdiri dari bencana alam yang sangat merugikan jiwa manusia maupun fasilitas dan infrastruktur yang ada di Indonesia.

Menurut Ritchie & Campiranon (2015) pariwisata sangat rentan terhadap berbagai guncangan eksternal seperti bencana alam, walaupun sebuah destinasi jarang terpapar akan bencana, namun sekalinya terjadi bencana yang dahsyat dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan yang hebat.

Berdasarkan info BMKG dengan data GPS mengungkapkan bahwa terdapat celah seismik di selatan Pulau Jawa yang memungkinkan terjadinya potensi gempa *megathrust* yang diikuti oleh tsunami hebat dengan taksiran mencapai 20 meter khususnya untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur ( Widyantoro dkk, 2020).

Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Pangandaran yang terletak di selatan dari wilayah Jawa dikelilingi oleh bentang alam yang sangat indah namun disisi lain kondisi geografis tersebut menyimpan potensi bencana yang rentan disebabkan oleh faktor cuaca yang fluktuatif kemudian terdapat aktifitas 7 gunung api yang aktif serta terdapatnya dua lempeng Euroasia dan Indoaustralia yang berada di selatan Pulau Jawa dan adanya 3 patahan sesar yakni sesar Lembang, Cimandiri dan Baribis.

Menurut Nana Ruhana (BPBD Kab. Pangandaran) bahwa Kabupaten Pangandaran menjadi daerah urutan ke 16 dari 514 Kabupaten dan Kota serta urutan ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam (<https://kkp.go.id/brsdm/poltekpangandaran/artikel/11981-poltek-kp-pangandaran-gelar-sosialisasi-dan-mitigasi-bencana>) di akses 14 Februari 2020.

Sebagai salah satu daya tarik wisata yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran sering mengalami bencana seperti banjir, angin kencang, tanah longsor serta memiliki sejarah cukup buruk terhadap bencana alam yang menelan jumlah korban jiwa yang banyak. Pada tanggal 17 Juli 2006 terjadi Gempa bumi 6,8 *skala richter* berjarak 225 km barat daya Kabupaten Pangandaran yang disusul dengan Tsunami setinggi 21 meter yang menelan korban jiwa mencapai 668 orang dan 65 orang hilang serta 9.299 luka (WHO, 2007). Bahkan gempa bumi baru saja terjadi pada tanggal 25 Oktober 2020 dengan kekuatan 5,9 *skala richter* yang tergolong gempa berkekuatan sedang, namun hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran khususnya kekhawatiran akan rasa aman dan nyaman dari wisatawan yang berkunjung.

Melihat dari sejarah dan pengalaman terhadap bencana yang rentan terjadi di Indonesia, serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana mulai dilakukan melalui pembangunan infrastruktur maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi bencana yang disebut mitigasi (BNPB) Pemerintah dan *Stakeholder* terkait mulai menyadari bahwa kegiatan mitigasi bencana menjadi hal penting yang butuh untuk dikembangkan, dalam mengurangi resiko dari dampak bencana yang tertuang dalam Perda Kabupaten Pangandaran No. 21 Tahun 2016 dan RTRW dalam Perda No. 3 Tahun 2018 Kabupaten Pangandaran. Selaras dengan Peraturan Daerah Kab. Pangandaran, Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan SOP Pengelolaan Krisis Kepariwisataaan pada tahun 2019 yang berorientasi kan kepada upaya adaptif dalam melakukan kegiatan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam Perda No. 21 Tahun 2016 sudah dijelaskan upaya yang harus dilakukan dalam manajemen bencana dimulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, namun peneliti melihat bahwa upaya mitigasi yang menjadi bagian dari fase pra bencana belum sepenuhnya dilakukan oleh *stakeholder* terkait seperti rencana kontijensi yang merupakan standar yang harus dilakukan di saat fase pra bencana, hal ini selaras dengan pernyataan pihak BPBD di dalam wawancara. Kemudian belum adanya standarisasi bangunan tahan gempa yang seharusnya di butuhkan apabila terjadi gempa besar, hal ini pun sesuai dengan pernyataan beberapa pengurus hotel yang peneliti interview. Model SOP yang dikemukakan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2019 menitik beratkan kepada upaya rekonstruksi, upaya mitigasi yang menjadi langkah awal dalam kepariwisataan menjadi sedikit terabaikan terkait peran *stakeholder*, langkah apa yang harus dilakukan dan persiapan apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana terjadi, karena hal ini akan berdampak besar dari segi ekonomi dan sosial khususnya di dunia kepariwisataan.

Dewasa kini perubahan cara pandang wisatawan yang awalnya hanya untuk sekedar bersenang senang sudah mulai bergeser, mereka mulai menyadari bahwasanya dibalik keindahan alam di saat berwisata tersimpan juga potensi bahaya bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Contohnya saja di saat berwisata pantai, mereka menyadari bahwa apabila terjadi gempa hebat, maka akan berpotensi tsunami yang dapat mengancam mereka. Penulis telah membagikan survei tentang pandangan mereka dan kesadaran mereka akan potensi bencana alam saat berwisata dari total sekitar 196 responden yang mengisi survei tersebut, 76% sudah menyadari bahwa dibalik wisata yang menyenangkan, terdapat bahaya



potensi bencana alam. Dari pemaparan data di atas, terdapat hal yang cukup bertolak belakang mengenai kepercayaan mereka terhadap upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana.

Dari total 197 responden yang memberikan pandangan mereka terhadap upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana, mayoritas dari mereka sekitar 46,2% belum percaya bahwa pemerintah sudah melaksanakan mitigasi bencana dengan baik. Sedangkan 26,4% dan 27,4% beranggapan masih ragu dan percaya terhadap upaya yang dilakukan pemerintah.

Hal ini selaras dengan data awal yang dikumpulkan peneliti saat melakukan tahap penelitian awal terhadap apa yang terjadi di Pantai Pangandaran. Sebagai salah satu destinasi unggulan dan favorit bagi wisatawan yang berkunjung, berdasarkan data kunjungan wisatawan tahun 2019 sebelum pandemic covid 19, dalam satu tahun Pantai Pangandaran dapat mendatangkan wisatawan sebanyak 3.775.000 yang berarti dalam 1 hari dapat mendatangkan sekitar 10.000 wisatawan, dan ini merupakan angka yang cukup besar untuk kedatangan wisatawan per hari. Dengan potensi bencana alam gempa bumi dan tsunami di Pantai Pangandaran, hal ini dapat mengancam keamanan dan keselamatan pengunjung apabila bencana terjadi secara mendadak.

Terdapat salah satu masalah yang terjadi terkait pengelolaan pariwisata dan mitigasi bencana di Pantai Pangandaran yaitu perbedaan pandangan setiap *stakeholder* (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat). BPBD sebagai *stakeholder* utama dalam mitigasi bencana tentunya berorientasi kepada keamanan dan keselamatan manusia khususnya yang sedang melakukan aktivitas kepariwisataan di Pantai Pangandaran, mereka melakukan upaya mitigasi struktural dan non

struktural sebagai langkah nyata dalam menunaikan kewajiban mereka. BPBD berkoordinasi dengan Disparbud Pangandaran sebagai *stakeholder* utama dibidang Pariwisata Pangandaran, namun masih terdapat perbedaan pandangan tentang urgensi dalam mitigasi bencana ini yang belum menjadi prioritas bagi sektor Pariwisata Pangandaran. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Megi Rijua selaku Kabid Destinasi Disparbud Kab Pangandaran:

“Mitigasi bencana belum secara spesifik dilakukan oleh Disparbud pangandaran karena masih terbatas kepada sektor inti terkait, sekarang sih masih berjalan pada masing masing sektor aja. Disparbud cuma meberi dukungan dari eksternal untuk melaksanakan mitgasi tersebut. Untuk sekarang masih terbatas pada rencana yang akan dilakukan kedepannya. terus masih sering terjadi miskomunikasi pada saat melakukan koordinasi dengan sektor lain, sudah dilakukan persiapan, biasanya miss pada saat pengekseskuan”

Hal ini selaras dengan statement yang dikemukakan oleh pihak BPBD, Bapak Ertin Respati sebagai SPV Pusdalops BPBD Pangandaran:

“Waktu melakukan mitigasi, kita kesulitan untuk bekoordinasi karena kurangnya rasa kepentingan bersama dengan sector terkait, ya masih bisa dibilang egois lah, padahal kan sebelumnya kita udah info kalo mau ngelakuin sesuatu. Ya jadinya pengkoordinasian sering kali miss karena kami coba bergerak sendiri. Tapi kalua sudah SKPD yang turun tangan, baru tiap sektor mau berjalan, ya walaupun partisipan nya hanya sekedarnya saja”.

Masyarakat pantai Pangandaran sudah menyadari potensi bahaya bencana alam yang dapat menimpa Pangandaran secara mendadak, hal ini dikarenakan mereka sudah berdomisili di Pangandaran sejak lama dan telah berdampingan dengan potensi bencana yang akan terjadi, mereka telah berpengalaman terhadap salah satu bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda pada tahun 2006, bentuk mitigasi sudah tertanam dibenak mereka, namun mereka sedikit beranggapan bahwa upaya mitigasi struktural seperti jalur evakuasi dan rambu tentang peringatan bencana yang terlalu banyak tidak perlu, Menurut pengakuan Sekjen Kompepar Pangandaran yakni bapak Toto :

“dulu sih pernah ada pemasangan baliho besar di daerah Pantai Timur yang bertuliskan (Kawasan ini rawan tsunami) jadinya masyarakat setempat jadi kesel terus berinisiatif untuk membongkar baliho itu, ya jelas aja bikin masyarakat dan wisatawan jadi takut berkunjung, kan udah cukup plang plang kecil aja kenapa harus dipasang yang gede, kalua ada oknum BPBD seperti itu kan bisa dikomunikasikan dlua dengan karang taruna terlebih dahulu, biar sama sama enak”

Hal ini sangat disayangkan karena *miss* komunikasi yang tujuannya sebenarnya cukup baik. Aktivitas yang dilakukan di Pangandaran tidak hanya untuk masyarakat lokal, melainkan wisatawan yang awam dengan petunjuk mitigasi serta arah evakuasi, Peneliti melakukan survei terkait tanggapan wisatawan tentang informasi evakuasi dan mitigasi bencana di daerah wisata.

Dari survei yang dilakukan terhadap 195 responden, 75% wisatawan masih merasa informasi terkait jalur dan tempat evakuasi masih belum cukup baik, hal ini sangat bertentangan dengan masyarakat lokal yang kurang setuju dengan informasi evakuasi yang terlalu banyak, mereka beranggapan bahwa hal ini dapat membuat wisatawan khawatir dalam berwisata.

Menurut Dadang Gunawan (Sekretaris PHRI Kab. Pangandaran) Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama dengan BNPB dan BPBD telah mulai menggalakan penyuluhan terkait pengetahuan bencana alam yang menjadi sasaran mitigasi dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana alam, terlebih lagi untuk kawasan wisata Pantai Pangandaran. Namun Pemerintah terkesan memberikan penyuluhan hanya kepada sektor masyarakat, namun terdapat hal penting lainnya terkait sektor swasta seperti pelaku bisnis usaha seperti Hotel dan penyewaan penginapan (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4477754/pengusaha-hotel-keluhkan-mitigasi-bencana-di-pangandaran-masih-rendah>) diakses 14 Februari 2020, hal ini dirasa sangat penting bagi mereka untuk

mengetahui dan berkolaborasi dengan Pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata yang berbasis mitigasi bencana agar sektor swasta memegang peran proaktif dalam mendukung kegiatan mitigasi Bencana. Menurut Agus Savana selaku Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, terdapat 323 Hotel dan penginapan yang telah bergabung dengan PHRI Kab Pangandaran jumlah yang cukup besar dalam peran aktif untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan pariwisata berbasis mitigasi bencana yang ada di Pangandaran (<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01320722/hotel-di-pangandaran-harus-berbasis-mitigasi-bencana>) diakses 2 Februari 2020.

Sektor swasta yakni Hotel dan Resort yang tetap berinvestasi di daerah rentan akan bencana alam masih banyak yang tidak memiliki mekanisme untuk mengurangi risiko dan bersiap untuk sebuah bencana serta keikutsertaan mereka yang terbatas atau bahkan terkesan tidak ada menurut UNISDR dan PATA (2015). Menurut Calgaro & Lloyd (2008) dan Ciocco & Michael (2007) kurangnya manajemen risiko bencana berasal dari perbedaan pandangan dalam risiko bahaya tentang persepsi, ketidaksepakatan tentang peran dan tanggung jawab, kekurangan biaya, kekurangan tenaga kerja, kurangnya pengetahuan, yang berkontribusi pada tingginya tingkat korban di kalangan wisatawan.

Terkait ketersediaan bangunan tinggi sebagai tempat evakuasi tsunami yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Pangandaran masih relatif sedikit, namun terdapat bangunan vertikal yang dimiliki oleh sektor swasta yakni bangunan hotel dengan ketinggian di atas 3 lantai. Hal ini dirasa menjadi potensi bagi kedua belah pihak untuk melakukan kolaborasi dengan maksud untuk menjadikan bangunan hotel sebagai tempat evakuasi sementara (TES), hal ini sejalan dengan pernyataan

UNEP (2007) hotel memiliki peran penting dalam melakukan penanggulangan bencana dikawasan pantai karena Hotel memiliki struktur bangunan yang kuat di kawasan pantai, memiliki struktur bangunan yang tinggi yang terdiri dari beberapa lantai yang cocok sebagai bangunan evakuasi vertikal apabila tsunami datang, kapasitas ruangan yang banyak, memiliki stok pangan yang cukup, generator darurat, tempat evakuasi darurat sementara dan tempat sumber informasi yang baik. Namun pihak swasta memiliki perbedaan pandangan dengan pemerintah terkait kebutuhan kerjasama dan keuntungan yang mereka dapatkan dalam bekerjasama.

Menurut pengakuan salah satu pihak hotel yang ada di Pangandaran yaitu Bapak Erianto :

“sosialisasi mitigasi ini tidak bisa dipukul rata kepada setiap elemen masyarakat, diperlukan detail pendekatan khusus bukan hanya secara umum, siapa yang menjadi inisiatif, leader, eksekutor ketika bencana harus dikaji secara mendalam. Ga jelas tim yang mana akan incharge ketika bencana terjadi. Kita ngerasain kalo BPBD sebagai stakeholder utama dalam mitigasi bencana harusnya inisiatif untuk melakukan pendekatan kepada pihak hotel, ya karena hotel dirasa telah melakukan mitigasi mandiri dan harusnya BPBD melakukan assessment atau standarisasi dari mitigasi yang telah dilakukan”.

Dalam pengelolaan mitigasi bencana yang dikaitkan dengan pengelolaan Kepariwisata sangat bersifat kompleks, pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengelola kedua hal tersebut dan perlu dukungan penuh yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat (Zaenuri, 2018). Saat ini tata kelola dalam mitigasi bencana masih bersifat adaptif berkaitan dengan pemerintah dalam pengambilan kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan yang notabene nya sudah sangat baik namun menurut Young (2006) model tata kelola yang bersifat adaptif cocok dilakukan apabila hanya dalam variabel kebencanaan saja, akan tetapi pengelolaan pariwisata dan bencana kurang cukup efektif apabila menggunakan model ini saja.

Ansell dan Gash (2007) menyatakan bahwa perlu perubahan paradigma tata kelola adaptif menjadi *collaborative* yang melibatkan setiap *stakeholder* dan berorientasi kepada konsensus, musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif untuk pengelolaan kepariwisataan dan kebencanaan. Kabupaten Pangandaran telah memiliki BPBD sebagai aktor tunggal yang sangat berperan dalam pengelolaan bencana, namun keterlibatan sektor publik lain masih dirasa belum maksimal seperti Disparbud, sektor swasta dan masyarakat menjadi sangat penting tidak hanya sekedar berpartisipasi dan menunggu arahan dari BPBD dalam upaya mitigasi bencana.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sektor pariwisata Indonesia dewasa ini menjadi salah satu penyumbang devisa Negara terbesar dan menempati urutan ke dua setelah industri perminyakan.
2. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018 diangka 4 juta kunjungan Wisatawan.
3. Indonesia adalah Negara yang cukup rentan terhadap bencana alam dikarenakan berada pada kawasan *ring of fire* dengan jumlah kejadian bencana mencapai 19 ribu kasus dalam kurun waktu 10 tahun.
4. Kabupaten Pangandaran menempati urutan ke 16 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam.
5. Perbedaan pandangan terhadap mitigasi dan pariwisata pada sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

6. Masih kurangnya kolaborasi sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis mitigasi bencana, dengan potensi peranan setiap stakeholder yang cukup besar.
7. Tata kelola pariwisata yang masih bersifat adaptif dalam pengelolaan mitigasi bencana dan pariwisata yang cukup kompleks. Paradigma tata kelola kolaboratif belum dipertimbangkan secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat di Pantai Pangandaran dalam pengelolaan pariwisata berbasis mitigasi bencana dengan pendekatan konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh DeSeve (2007) dengan 8 indikator yaitu *Networked Structure, Commitment to a common purpose, Trust among participants, Governance, Access to authority, Distributive accountability/responsibility, Sharing information, Access to resources*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi *eksisting* pengelolaan mitigasi bencana alam di kawasan wisata Pantai Pangandaran?
2. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan mitigasi bencana alam di kawasan wisata Pantai Pangandaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kondisi *eksisting* lapangan berkaitan dengan mitigasi bencana alam di kawasan wisata Pantai Pangandaran.
2. Memaparkan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan mitigasi bencana alam di kawasan wisata Pantai Pangandaran.

#### **D. Fokus Penelitian**

Klasifikasi Bencana dibagi atas 2 kategori yaitu bencana alam dan bencana yang diakibatkan oleh manusia (Gustin, 2005:61). Dalam Hal ini peneliti berfokus kepada bencana yang ditimbulkan oleh alam, dikarenakan bersifat abstrak dan tidak dapat di prediksi secara *exact* dan pasti.

Penelitian berfokus kepada kolaborasi oleh *stakeholder* primer bidang pariwisata dan kebencanaan yakni sektor Pemerintah (BPBD dan Disparbud Pangandaran), Swasta (Industri Hotel) dan Masyarakat (Penduduk lokal dan Wisatawan) yang ada di kawasan wisata Pantai Pangandaran dalam pengelolaan mitigasi bencana.

Coppola (2015) mengungkapkan terdapat tiga fase utama dalam kegiatan manajemen penanggulangan bencana yakni, (1) fase pra-bencana; (2)saat terjadi bencana; (3) pasca bencana. Pada penelitian ini berfokus kepada fase pra bencana yang menyangkut mitigasi bencana yang dilakukan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoritis.

Penelitian dilakukan untuk memperdalam dan mempertajam pemahaman teori dan analisis mahasiswa Pascasarjana serta menjadi rujukan penelitian dimasa yang akan datang terkait kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat pengelolaan pariwisata berbasis mitigasi bencana yang diharapkan dapat memberikan referensi dalam pengembangan pariwisata.

##### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang menempatkan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata berbasis mitigasi bencana.